

BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

Reformulasi strategi penangkalan Indonesia terhadap tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara dimaksudkan sebagai upaya komprehensif Pemerintah Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI. Fokus utama pembahasan tulisan ini adalah bagaimana reformulasi strategi penangkalan Indonesia dalam menghadapi tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional.

- a. Sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan adalah salah satu sumber ketegangan regional dan global yang telah berlangsung cukup lama dan belum menunjukkan arah penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan merujuk pada peta konflik serta klaim yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, secara umum terdapat tiga hal utama yang mendasari munculnya konflik di Laut Cina Selatan. *Pertama*, sebagai sebuah kawasan, perairan dan gugusan pulau di Laut Cina Selatan mengandung komoditas sumber daya alam yang bernilai tinggi, yakni berupa minyak bumi, gas alam, sumber daya perikanan, dan kekayaan bawah laut lainnya. *Kedua*, kawasan Laut Cina Selatan memiliki nilai geopolitik dan geostrategi yang besar bagi negaranegara yang mampu menguasainya. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang pesat terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan menimbulkan kompetisi antara Cina dengan kekuatan Amerika Serikat dan Eropa.
- b. Tindakan koersif Cina di Laut Cina Selatan dimanifestasikan dalam banyak wujud. Berbagai rincian tindakan koersif yang dilakukan oleh Cina sebagai wujud dari politik ekspansionis dan strategi wilayah abu-abu guna mempertegas klaim di wilayah Laut Cina Selatan diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, pemasangan kekuatan di perbatasan yang belum disepakati. *Kedua*, melakukan Latihan dan operasi militer di wilayah klaim. *Ketiga*, Melakukan ancaman penggunaan kekuatan. *Keempat*, Tindakan provokatif terhadap aset militer negara lain yang beroperasi di kawasan

klaim. Kelima, Aktivitas paramiliter. Keenam, Pengerahan badan usaha milik negara.

c. Pelanggaran hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia di wilayah Natuna oleh Cina menjadikan dasar pergeseran posisi Indonesia dari pihak yang bertindak sebagai negara netral (*non-claimant states*) menjadi negara yang meningkatkan kewaspadaan nasionalnya. Sebagai sebuah negara maritim dan negara yang berupaya untuk menjadi negara berkekuatan maritim, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional. Adapun kepentingan nasional yang inheren dan paling mendasar dari Indonesia sebagai sebuah negara maritim adalah menjaga dan memelihara kedaulatan nasionalnya, serta keutuhan wilayah nasional dari ancaman dan gangguan pihak-pihak lain. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia di Laut Natuna Utara terbilang cukup rumit. Persoalan yang dihadapi bukan sekedar berada pada cakupan dimensi pertahanan dan keamanan sebagai respons atas tindakan koersif Cina, melainkan pembentahan secara gradual, komprehensif, berkesinambungan, serta bersifat multidimensi.

d. Dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan untuk merespons tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara, langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melihat problematika yang ada secara keseluruhan, yakni penerapan politik ekspansionis oleh Cina dalam bentuk strategi wilayah abu-abu di Laut Cina Selatan, yang mana salah satu eksesnya adalah pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia mempunyai dua opsi dalam merespons Cina. Pertama, Indonesia memiliki peluang untuk merespons Cina secara simetris melalui adu strategi guna memenangkan kepentingan nasional secara langsung. Kedua, Indonesia dapat menggunakan instrumen ASEAN dengan memainkan sentimen kawasan dan kepentingan negara-negara sahabat lainnya yang bertikai dengan Cina di zona yang sama. Kedua opsi tersebut, untuk kondisi saat ini, ditempuh secara *doubletrack* oleh Indonesia. Jika Cina bermain secara cerdik dengan menempatkan diri pada posisi moderat, Indonesia juga memiliki peluang memainkan respons cerdik melalui penerapan strategi penangkalan. Penerapan strategi penangkalan

merupakan bentuk reformulasi strategi yang dilakukan Indonesia apabila konsisten dan persisten diterapkan. Dengan berpijak pada konsepsi sistem pertahanan semesta, strategi penangkalan sebagai bentuk reformulasi strategi Indonesia dalam merespons tindakan koersif Cina akan dijalankan secara komprehensif dan multidimensi. Adapun garis besar mengenai pokok-pokok strategi penangkalan yang akan diterapkan meliputi: (1) perumusan strategi penangkalan untuk merespons situasi khusus di Laut Natuna Utara, (2) penekanan komitmen pemerintah kepada pihak luar untuk melakukan strategi penangkalan, (3) kesiapan untuk menerima atau menanggung risiko dari penerapan strategi penangkalan, (4) melakukan kerja sama dengan negara-negara lain untuk mendapatkan efek gulir kebijakan yang lebih besar, serta (5) pengendalian diri yang kuat untuk tidak terjebak dalam situasi di mana Indonesia akan memulai terlebih dahulu konflik militer secara terbuka dengan Cina. Respons komprehensif yang dilakukan Indonesia terhadap Cina secara garis besar ada dua, yakni (1) pendekatan militer untuk menciptakan efek penggentar, serta (2) pendekatan non-militer yang meliputi strategi diplomasi, strategi informasi, serta strategi perdagangan atau ekonomi.

18. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi diajukan sebagai tindak lanjut dari penulisan Taskap ini, sebagai berikut:

Pertama, sebagai sebuah studi akademik, penulisan Taskap bertemakan reformulasi strategi penangkalan Indonesia dalam menghadapi tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara ini masih memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dikarenakan pertahanan nasional merupakan gatra dalam ketahanan nasional yang bersifat sangat dinamis. Perubahan di masa-masa yang akan datang tentu saja akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pola perumusan strategi dan kebijakan dalam merespons dinamika di Laut Natuna Utara secara khusus dan Laut Cina Selatan secara umum, sehingga membutuhkan penelitian atau kajian yang sifatnya berkesinambungan dan jangka panjang. *Kedua*, direkomendasikan kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) sebagai

leading sector dalam formulasi strategi penangkalan di Laut Natuna Utara untuk merumuskan strategi penangkalan secara komprehensif melalui pendekatan militer dan non-militer (diplomasi, informasi, perdagangan dan ekonomi) yang didiseminaskan, diinformasikan, dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga negara terkait lainnya yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam RI.

Ketiga, direkomendasikan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel TNI di semua matra (terutama AL), alat utama sistem persenjataan, sistem angkutan laut nasional, serta sarana dan prasarana pendukung militer dalam menerapkan strategi penangkalan berbasis pendekatan militer di Laut Natuna Utara. **Keempat**, direkomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara Asia Tenggara, serta mengedepankan instrumen organisasional ASEAN dalam merespons tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara. Kemenlu RI juga dapat memainkan instrumen yang lebih besar, yakni PBB, apabila terjadi pelanggaran yang signifikan oleh militer Cina di Laut Natuna Utara yang notabene telah diregulasi sesuai dengan rezim hukum laut internasional (*UNCLOS 1982*).

Kelima, direkomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) untuk melakukan diplomasi keras di bidang perdagangan apabila Cina terus melakukan pelanggaran berulang di ZEE Indonesia. Melalui Kemendag RI, Kemenperin RI, dan BKPM RI misalnya, Indonesia dapat secara asertif menurunkan neraca perdagangan bilateral kedua negara dan mengalihkan aktivitas perdagangan yang telah sekian lama dijalın dengan Cina ke negara lain yang lebih kompatibel dan kooperatif dalam melakukan kerja sama perdagangan. **Keenam**, direkomendasikan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara yang terlibat di atas agar dalam pelaksanaan strategi penangkalan di Laut Natuna Utara dapat mempererat komunikasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan sesuai bidang masing-masing dalam rangka memberikan dampak yang optimal bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia, utamanya tegaknya kedaulatan nasional di Laut Natuna Utara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Asnani, Usman & Rizal Sukma. 1997. *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: CSIS Indonesia
- Bappenas. 2008. *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) Tahun 2005-2025*. Jakarta: Bappenas RI. Hal. 31.
- Chang, A. et. al. 2015. *Shades of Gray: Technology, Strategic Competition, and Stability in Maritime Asia*. Washington D.C.: Center for a New American Security
- Green, M. Et. al. 2017. *Countering Coercion in Maritime Asia: The Theory and Practice of Grey Zone Deterrence*. Lanham: Rowman & Littlefield
- Echevarria, Antulio J. II. 2015. "How Should We Think about "Gray-Zone" Wars?". *Infinity Journal*, Volume 5, Issue 1, fall 2015. Hal. 16-20.
- Erickson, Andrew S. 2017. "Understanding China's Third Sea Force: The Maritime Militia." Fairbank Center Blog, Harvard University, September 8, 2017
- Fravel, M., 2008. *Strong borders, secure nation*. Princeton: Princeton University Press
- Hari Utomo, Mitro Prihantoro, Lena Adriana. 2017. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut Cina Selatan, *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Volume 3(3), halaman. 68.
- Jervis, Robert. 1979. "Deterrence Theory Revisited". *World Politics* 31, No. 2 (1979): 297.
- Jiemian, Yang. 2013. *China's Diplomacy: Theory and Practice*. World Publishing Corporations
- Karmin Suharna. 2012. *Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*. Majalah Ketahanan Nasional (Swantara), Edisi 94, Halaman. 33-34.
- Kaufmann W.W. 1989. "The Requirements of Deterrence". Dalam Bobbitt P., Freedman L., Trevorton G.F. (eds). *US Nuclear Strategy*. London: Palgrave Macmillan. Hal. 168-169
- Kissinger, Henry A. 1955. "Military Policy and Defense of the Gray Areas". *Foreign Affairs* 33, No. 3 (1955): 416-428
- Krepinevich, A., Watts, B. and Work, R. 2003. *Meeting the anti-access and area denial challenge*. Washington, DC: Center for Strategic and Budgetary Assessments.

- Kemenko Marves. 2018. "Kapushidrosal dan Kabadan Info Geospasial. Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayah RI
- Laksmana, Evan A. 2021. *Indonesia dan Laut Cina Selatan: Tantangan Strategis dan Pilihan*. Bahan Presentasi Diskusi Panel PPSA XXIII Lemhannas RI 2021.
- Liu, Guoli. 2011. *Understanding China Today: Politics and Government in China*. ABC-CLIO and Morrison, Wayne. 2011. *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Congressional Research Service
- Morgenthau, Hans J. 1948. *Politic Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Novak, B., & Mahnken, T. 2014. "Strategic Studies Quarterly". 8(3), 133-135.
- PCA. 2016."Press Release: The South China Sea Arbitration (*The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China*)". 12 July 2016
- Republic of France. 2017. *Defence and National Security Strategic Review 2017- Key Points*, Paris, 2017a, p. 47
- Santoso, Totok Imam. 2020. *Aksi Agresivitas Cina Pada ZEE Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI*. Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 41, Maret 2020, halaman. 36-37
- Snyder, G. 1960. "Deterrence Theory Revisited". Journal of Conflict Resolution 4, No.2 (1960): 167
- Sullivan, M.P. 1995. *The Mechanism for Strategic Coercion*. Alabama: Air University Press Maxwell Air Force Base
- Tanaka, Yoshifumi. 2018. *The Divided Oceans: International Law Governing Jurisdictional Zones*. Cambridge University Press, pp 196- 228
- UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7
- US Departement of Defense. 2018. *Joint Doctrine Note 1-18 Strategy*.
- Wu, Shicun. 2013. *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: A Chinese Perspective*. Chandos Asian Studies Series. Elsevier Reed
- Wirajuda, Hassan. 2021. *Kebijakan Pertahanan Indonesia Menyikapi Potensi Konflik LCS: Bagaimana Jika Upaya Diplomasi Gagal?* Bahan Presentasi Pada Diskusi Panel PPSA XXIII Lemhannas RI 2021.
- Zhou, J. 2014. *Chinese vs. Western Perspectives: Understanding Contemporary China*. Plymouth: Lexington Books, p. 11.

Zheng Wang. 2015. *Asian Survey: Chinese Discourse on the Nine Dash Line: Rights, Interest, and Nationalism*, Volume 35(3), the University of California, pp. 503.

Internet

"Anggaran Militer China Meningkat 6,8 Persen pada Tahun Ini, Bakal Habiskan Rp 3.009 Triliun", diakses di <https://www.kompas.com/global/read/2021/03/05/142235070/anggaran-militer-china-meningkat-68-persen-pada-tahun-ini-bakal-habiskan?page=all>

Asean.org. 2021. "ASEAN Website – One Vision, One Identity, One Community". [online] https://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-3

Anugerah, Boy. 2016. *Geliat Tiongkok dan Kewaspadaan Nasional*. Diakses di <https://mediaindonesia.com/opini/63278/geliat-tiongkok-dan-kewaspadaan-nasional-indonesia>

Brands, H. 2016. "Paradoxes of the Grey Zone". E-Notes. (5/2/2016), <https://www.fpri.org/article/2016/02/paradoxes-gray-zone>

CNN Indonesia. 2018. "Panglima Resmikan Satuan TNI Terintegrasi di Natuna". (18/12/2018), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181218180004-20-354636/panglima-resmikan-satuan-tni-terintegrasi-di-natuna>

D. Yung, C. and McNulty, P., 2015. "An Empirical Analysis of Claimant Tactics in the South China Sea". [online] National Defense University Press, <https://ndupress.ndu.edu/Media/News/Article/718101/an-empirical-analysis-of-claimant-tactics-in-the-south-china-sea>

Erickson, A. and Kennedy, C., 2021. "Directing China's "Little Blue Men": Uncovering the Maritime Militia Command Structure". Asia Maritime Transparency Initiative. [online] <https://amti.csis.org/directing-chinas-little-blue-men-uncovering-the-maritime-militia-command-structure>

"Filipina Sebut Situasi di Laut Filipina Barat Stabil dan Damai", diakses di <https://www.aa.com.tr/id/regional/filipina-sebut-situasi-di-laut-filipina-barat-stabil-dan-damai/2297751>

Johnson, G. and Scholes, K. 1997. *Exploring corporate strategy*. London: Prentice Hall.

Nickols.us. 2021. "Strategy: Definitions and Meaning". [online], https://nickols.us/strategy_definition.htm

"Kapal AL China dan AS Berebut Pengaruh di Laut China Selatan", diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qrhe5j377/kapal-al-china-dan-as-berebut-pengaruh-di-laut-china-selatan>

KBBI. "Koersi". <https://www.kbbi.web.id/koersi>

- LaGrone, S. and & Rarr, V., 2021. "Wu to CNO: Beijing Won't Stop South China Sea Island Building". [online] USNI News, <https://news.usni.org/2016/07/18/plans-wu-cno-richardson-beijing-wont-stop-south-china-sea-island-building>
- Mazarr, M. 2018. "Understanding Deterrence". <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE295.html>
- Muhar Junef. 2018. Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18(2), halaman. 228.
- "Laut Cina Selatan", diakses di <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/taiwan/>
- Morgensten, M. 2018. "China has militarised the South China Sea and got away with it". (21/6/2018), <https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got-away-with-it>
- Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit", diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit>
- Khan, Mujeeb R. 2015. "Coercion, Human Behavior". (29/12/2015), <https://www.britannica.com/topic/coercion>
- "Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna", diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>
- Robert C Beckam dan Tara Davenport, "CLCS Submission and Claims in the South China Sea", <http://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2009/09/Beckman-Davenport-CLCSHCMC-10-12Nov2010-1.pdf>, diakses pada 22 Agustus 2021, pukul 22.57 WIB..
- "Sengkarut ASEAN - Cina di Laut Cina Selatan", diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160620170412-106-139566/sengkarut-asean-china-di-laut-china-selatan>
- Surya Wiranto. 2016. *Resolusi Konflik Menghadapi Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera. Halaman. 88
- The Free Dictionary [Internet]. 2008. "Sovereignty". West's Encyclopedia of American Law, edition 2, The Gale Group, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/sovereignty>
- UN. 1982. *United Nations Conventions on the Law of the Sea*. https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, diakses di <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-1996-06.pdf>

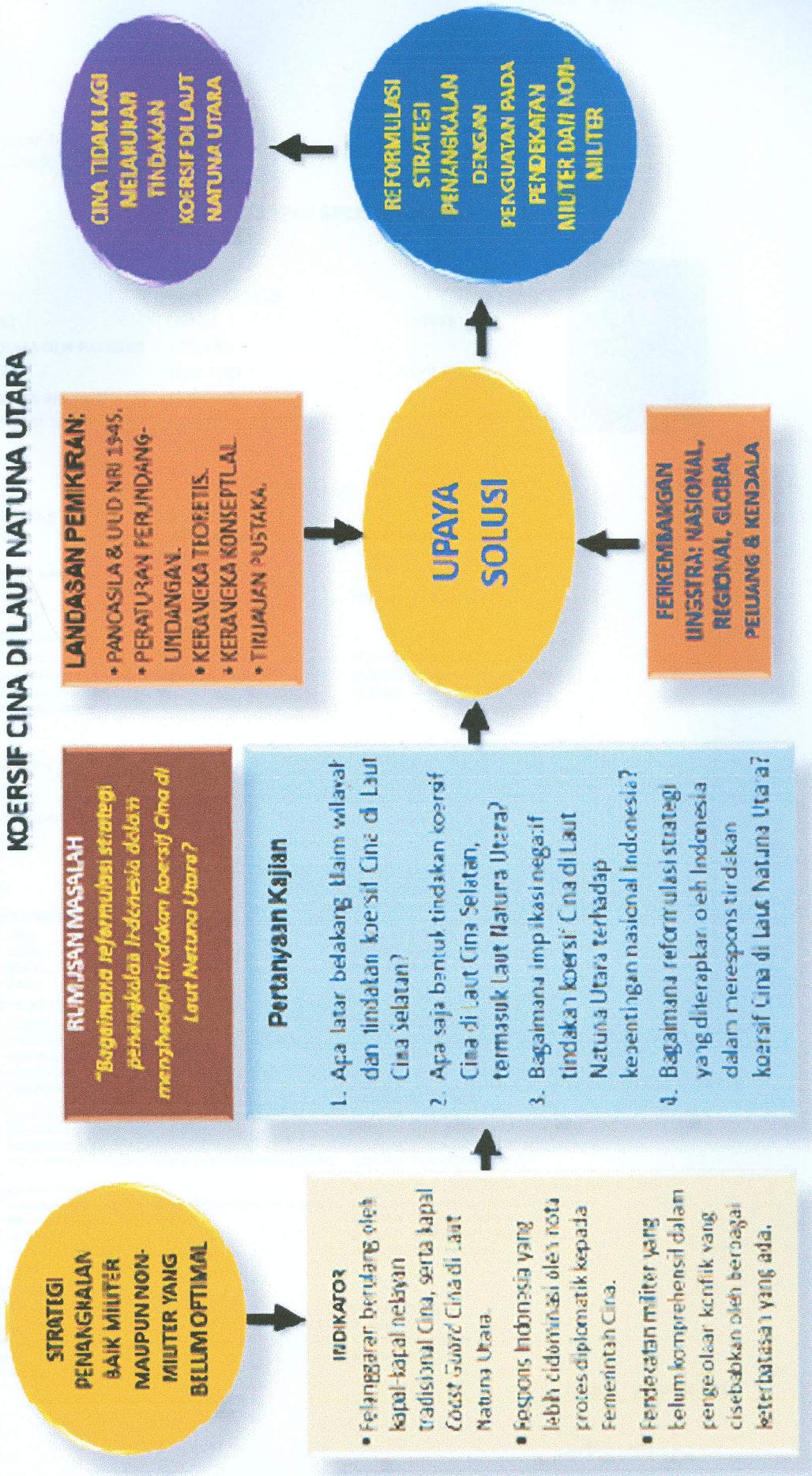
- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diakses di <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/331/node/539/undangundangan-nomor-3-tahun-2002/>
- UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara, diakses di https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF
- Victor Muhammad, Simela. 2021. Isu Laut Cina Selatan: Ekspansi Cina dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi. *Info Singkat Bidang Hubungan Internasional: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume XIII, No. 5/I/Puslit/Maret 2021. Diakses di <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-2393-154-20210427101416.pdf>
- Vliz.be. 2021. *The United Nations Convention on the Law of the Sea*. PharmaSea toolkit [online], <http://www.vliz.be/projects/marinegeneticresources/united-nations-convention-law-sea.html>
- Zhu, Charlie. 2012. "China Tests Troubled Waters with \$1 Billion Rig for South China Sea". (20/6/2012), <https://www.reuters.com/article/us-china-southchinasea-idUSBRE85K03Y20120621>



TANHANA DHARMMA MANGRVA

ALUR PIKIR

REFORMULASI STRATEGI PENANGKALAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN KOERSIF CINA DI LAUT NATUNA UTARA



MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT
DINAS ADMINISTRASI PERSONEL

KUTIPAN RIWAYAT HIDUP

NRP : 9800/P
NAMA : DAFIT SANTOSO
PANGKAT : LAKSMA **KORPS** : P
MASA DINAS DLM PANGKAT : 3 Th, 4 Bln
TMT TNI : 26-07-1990 **TMT FIKTIF** : --
MASA DINAS PRAJURIT : 31 Th, 0 Bln
TEMPAT / TGL LAHIR : JAKARTA , 16-06-1968 **JENIS KELAMIN** : L
USIA : 53 Th, 2 Bln
SUKU : JAWA **AGAMA** : ISLAM
JABATAN : KODIKLATAL/DITJIANBANG/DIR
LAMA JABATAN : 0 Th, 1 Bln
ALAMAT : JL.MASJID NO.49 RT11/1 KEL.CEGERJAKTIM



I PENDIDIKAN UMUM

SD TAMAT TH.1981 SMP TAMAT TH.1984
SMA TAMAT TH.1987

II PENDIDIKAN MILITER

26-07-1990 AAL-36 TH.1990 01-07-1991 DIKPASIS ANGK-3 TH.1991
16-10-1992 MIDSHIPMAN SEA TRAINING DEPLOY TH.1992 26-04-1995 DIKLAPA-(SBA ANGK-9 TA.1994/1995
03-11-2000 DIKLAPA-II/KOUM ANGK-14 TA.2000 18-10-2006 SESKOAL ANGK-44 TH.2006
24-11-2014 DIKREG SESKO TNI - 41 TH.2014

III BAHASA ASING

INGGRIS A

IV BAHASA DAERAH

JAWA P
SUNDA A

V PROFESI

VI RIWAYAT PANGKAT

26-07-1990 LETDA 01-10-1993 LETTU
01-10-1997 KAPten 01-10-2001 MAYOR
01-04-2007 LETKOL 01-04-2012 KOLONEL
03-04-2018 LAKSMA

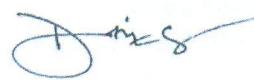
VII RIWAYAT JABATAN

01-12-1990 KODIKAL/DPB 01-08-1991 ARMATIM/KAPAL
01-01-1992 ARMATIM/SATKOR/KRI AMY (AKHMAD YANI-351)/ASS PADIV BAH
15-11-1994 ARMATIM/DENMA/DPB/DIKLAPA I 15-06-1994 ARMATIM/SATKOR/KRI AMY (AKHMAD YANI-351)/PADIV NAGI
01-12-1995 ARMATIM/SATKOR/KRI SRI (ISLAMET RIYADI-352)/DIV PIT/KA 15-04-1995 ARMANBAR/SATROL/KRI SGR (SIGUROT-864)/PALAKSA
01-06-2000 KOARMABAR/MAKOARMA/DENMAKO/DPB/DIKLAPA II 01-05-1997 ARMANBAR/SATROL/KRI SGR (SIGUROT-864)/DAN
15-09-2002 KOLINLAMIL/SATLINLAMIL JKT/KRI MTW (MENTawai-959)/DAN 01-11-2000 MABES TNI/STAF UMUM/SOPS KASUM TNI/BAN V KERKAMTAS/BANDYA 2
01-11-2004 KOLINLAMIL/DISKONLEK/SUBDIS BINKOM/KA 15-03-2000 KOLINLAMIL/SATLINLAMIL JKT/KRI TMO (TELUK MANADO-537/DAN
01-11-2005 KOLINLAMIL/DENMAKO/DPB 15-07-2005 KOLINLAMIL/SOPS/BAN DALNAS/PAIPS
01-11-2007 MABES TNI/STAF UMUM/SOPS KASUM TNI/BAN V KERKAMTAS/BANDYA 1 19-10-2006 SESKOAL/UDIK/DEP JEMENSI JEMEN/KA
JUKPROS/PA 23-09-2011 KOARMABAR/SATROL/DAN
06-08-2012 KOARMABAR/SATKAT/IDAN 22-04-2013 KOARMATIM/LANTAMAL V SBY/LANAL DENPASAR/DAN
20-02-2014 KOARMABAR/SAHLI PANG A WILNAS/DIKREG XLI SESKO TNI TA 2014 21-11-2014 KOARMATIM/LANTAMAL VII KPG/WADAN
30-05-2016 MABESAL/SRENA KASAL/BAN I RENTRA/PA 14-02-2018 KOARMABAR/GUSKAMLA/DAN
08-05-2018 KOARMADA II/GUSKAMLA/DAN 24-06-2019 MABESAL/SATF KHUSUS KASAL
14-08-2019 KOARMADA II/LANTAMAL II PDG/DAN 18-11-2020 KOARMADA II/KAS
19-07-2021 KODIKLATAL/DITJIANBANG/DIR

VIII TANDA JASA

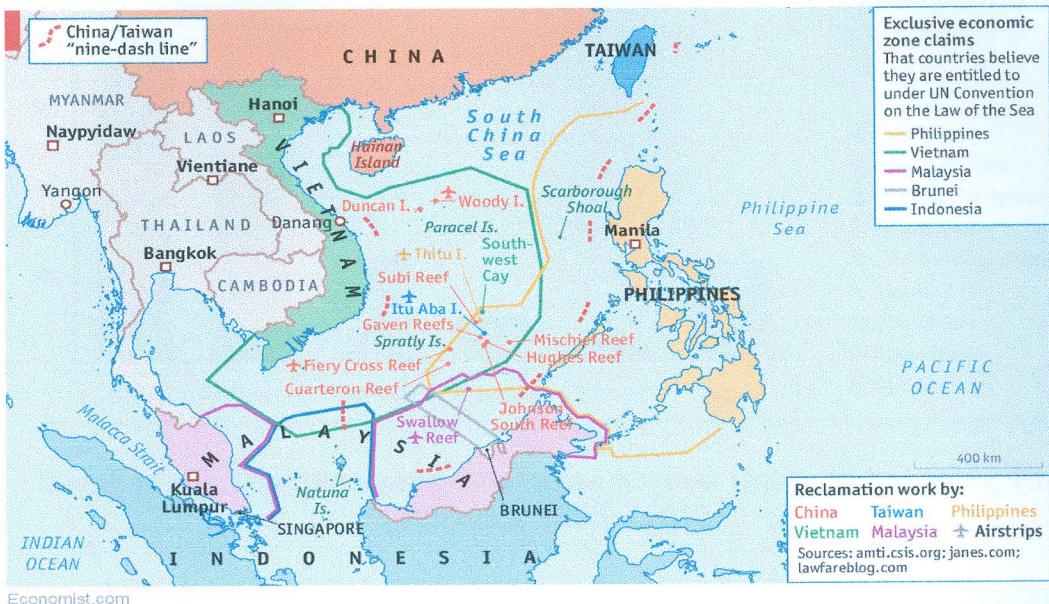
BT. YUDHA DHARMA NARARYA BT. JALASENA NARARYA
SL. KESETIAAN VIII SL. KESETIAAN XVI
SL. KESETIAAN XXIV SL. WIRA DHARMA (PERBATASAN)
SL. WIRA NUSA SL. WIRA KARYA
SL. KOMANDAN KRI

Jakarta, Agustus 2021

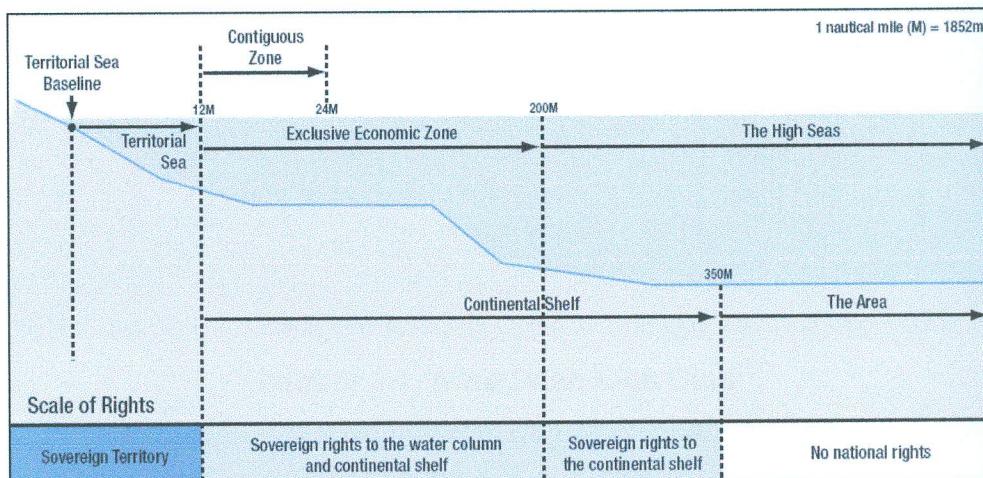


DAFIT SANTOSO
LAKSAMANA PERTAMA TNI

LAMPIRAN 1 “GAMBAR”



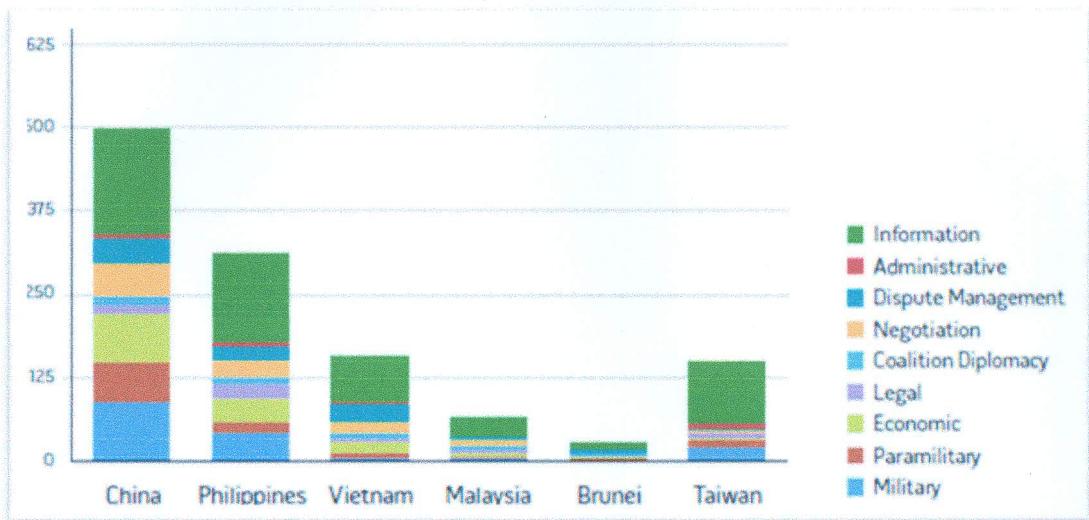
Gambar 1.1. Klaim Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara-Negara Kawasan di Laut Cina Selatan⁷⁵.



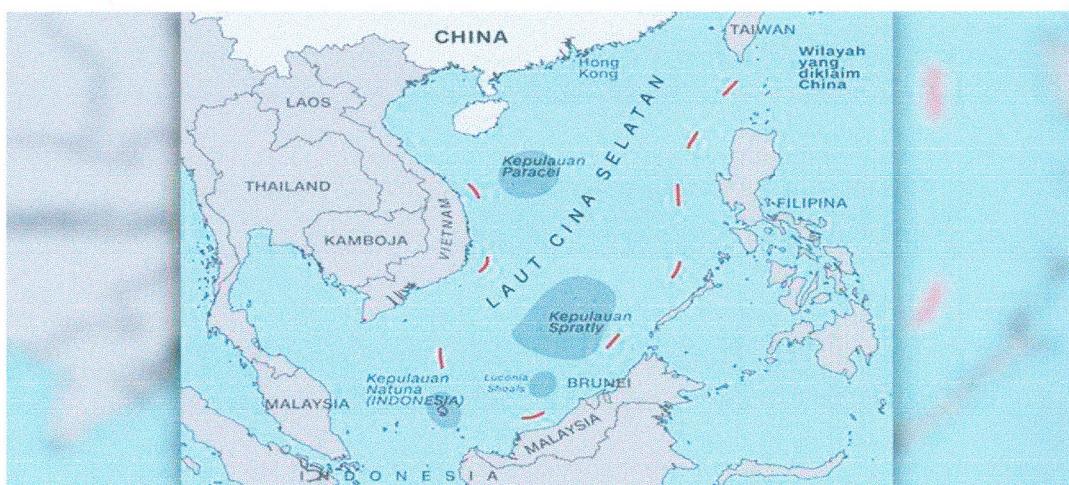
Gambar 2.1. Batas-Batas Wilayah Laut Sesuai UNCLOS⁷⁶

⁷⁵ Morgenstern, M. 2018. "China has militarised the South China Sea and got away with it". (21/6/2018), <https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got-away-with-it>, diakses pada 8 Agustus 2021, pukul 1.07 WIB.

⁷⁶ Vliz.be. 2021. *The United Nations Convention on the Law of the Sea*. PharmaSea toolkit [online], <http://www.vliz.be/projects/marinegeneticresources/united-nations-convention-law-sea.html>, diakses pada 15 Agustus 2021, pukul 1.50 WIB.



Gambar 2.2. Tindakan yang Dilakukan Negara Untuk Mendukung Klaim Wilayah, 1995 – 2013⁷⁷



Gambar 3.1. Nine Dash Line Cina⁷⁸

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ "Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit", diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit>, pada 22 Agustus 2021, pukul 22.52 WIB.